

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013) metode kuantitatif adalah penelitian yang mengarah pada filsosofi positivisme, penelitian dengan cara ini digunakan untuk meneliti populasi dan sampel yang telah ditentukan, analisis data bersifat kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif yang digunakan berupa data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan penelitian ini dilakukan untuk memberikan deskripsi secara rinci mengenai suatu gejala atau fenomena.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dan bersifat studi kasus yang dikaji secara kuantitatif. Penelitian ini memaparkan kondisi keuangan Kota Pangkalpinang, sedangkan secara kuantitatif dihitung tingkat kinerja yang ditinjau dari rasio Efektivitas, Efisiensi, Kebutuhan Fiskal, IKR, *Share and Growth*, dan IKK Kota Pangkalpinang Tahun 2015 sampai dengan 2019.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di daerah Kota Pangkalpinang. Penelitian dilakukan sejak Bulan Januari 2021 sampai dengan selesai.

3.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel III.1 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Efektivitas	Membandingkan antara realisasi penerimaan dengan target.	$\frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Rasio
Efesiensi	Membandingkan antara realisasi pengeluaran daerah dengan pendapatan daerah.	$\frac{\text{Pengeluaran Daerah}}{\text{Penerimaan}} \times 100\%$	Rasio
Kebutuhan Fiskal	Membandingkan antara Pengeluaran Aktual perkapita untuk Jasa publik dengan Standar Kebutuhan Fiskal.	PPP SKF	Rasio
IKR	Membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan total belanja rutin suatu daerah.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total belanja rutin}} \times 100\%$	Rasio
<i>Share and Growth</i>	<i>Share</i> yaitu membandingkan pendapatan asli daerah dengan total belanja. Sedangkan <i>growth</i> yaitu membandingkan antara PAD periode i dikurang PAD periode i-1 dibagi dengan PAD periode i-1.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$ $\frac{\text{PAD } i - \text{PAD } i-1}{\text{PAD } i-1} \times 100\%$	Rasio
IKK	Suatu metode dengan menggunakan rata-rata hitung dari Indeks Pertumbuhan (<i>Growth</i>), Indeks Elastisitas dan Indeks <i>Share</i>	$\frac{XG + XE + XS}{3}$	Rasio

Sumber : Setiyawan, (2013)

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif selama lima tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2019, diperoleh dari Badan Pusat Statistika Kota Pangkalpinang dan dari

Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Dokumentasi dan Riset kepustakaan. Dokumentasi yaitu dilakukan dengan memperoleh data dari Badan Pusat Statistika Kota Pangkalpinang dan dari Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang. Data yang diperoleh terbagi menjadi dua yaitu data umum dan data khusus. Data umum berupa gambaran umum Kota Pangkalpinang, Sedangkan data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Kota Pangkalpinang tahun 2015-2019. Riset kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang relevan dengan subjek masalah sebagai objek penelitian. Informasi diperoleh dari jurnal ilmiah, buku dan sumber lain.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data yang dikumpulkan dan dapat memberikan interpretasi. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis rasio keuangan daerah, analisis data yang digunakan yaitu :

3.5.1 Analisis Efektivitas

Organisasi program dianggap efektif apabila keluaran yang direalisasikan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, efektivitas berfokus pada hasil. Output dalam hal ini adalah realisasi pendapatan sedangkan tujuan atau targetnya adalah target penerimaan. Semakin banyak output yang berkontribusi terhadap target maka akan semakin efektif suatu unit beroperasi, sehingga untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan dapat dilihat

perbandingan antara realisasi pendapatan dengan target sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria evaluasi penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria berikut (Pekel, 2016):

- 1) 100% keatas berarti sangat efektif.
- 2) 90%-100% berarti efektif.
- 3) 80%-90% berarti cukup efektif.
- 4) 60%-80% berarti kurang efektif.
- 5) 60% kebawah berarti tidak efektif.

3.5.2 Analisis Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan keluaran dan masukan, dengan kata lain output/satuan input. Dengan demikian efisiensi atau kegunaan adalah rasio keluaran terhadap masukan. Outputnya dalam hal ini adalah realisasi biaya perolehan pendapatan daerah yaitu belanja dan inputnya adalah realisasi dari penerimaan daerah yaitu pendapatan. Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara pengeluaran daerah dengan penerimaan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Daerah}}{\text{Penerimaan}} \times 100\%$$

Standar untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah, yaitu: 100% keatas tidak efisien; 90% - kurang 100% kurang efisien; 80% - kurang 90% cukup efisien; 60% - kurang 80% efisien; dibawah 60% sangat efisien.

3.5.3 Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan Fiskal digunakan untuk menganalisis atau mengukur dana yang diperlukan suatu daerah untuk menjalankan fungsi layanan dasar dan komprehensif. Kebutuhan Fiskal maksimum berarti indeks dianalisis dengan hasil yang lebih tinggi. Pengukuran tersebut dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata standar fiskal se provinsi dengan membandingkan jumlah belanja normal per kapita dengan jumlah kabupaten/kota (Chodariyanti, 2015):

$$SKF = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Daerah} / \text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}}$$

Kemudian melakukan perhitungan untuk mencari Indeks Pelayanan Publik per kapita (IPPP) masing-masing pemerintah kabupaten/kota dengan rumus:

$$IPPP = \frac{PPP}{SKF}$$

Dimana:

PPP = Pengeluaran Aktual perkapita untuk jasa publik (jumlah pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin)

IPPP = Indeks Pelayanan Publik perkapita

SKF = Standar Kebutuhan Fiskal

Hasil akhir dari perhitungan IPPP apabila hasilnya semakin tinggi, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar. Hal tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya pengeluaran suatu daerah dalam memberikan pelayanan yang mendasar dan menyeluruh. Suatu peningkatan pengeluaran yang terus meningkat dan tidak sebanding dengan penerimaan akan mengakibatkan ketimpangan dan berpengaruh terhadap kinerja.

3.5.4 Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Indeks Kemampuan Rutin digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah yang berhubungan dengan fiskal daerah. IKR merupakan gambaran sejauh mana PAD mampu membiayai belanja rutin. Belanja rutin yang dimaksud berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal serta pengeluaran rutin lainnya. IKR dirumuskan dengan membandingkan antara PAD dengan Belanja rutin (Putri, 2017):

$$\text{IKR} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Rutin}} \times 100\%$$

Tolak ukur untuk melihat sejauh mana kemampuan keuangan daerah berdasarkan rasio indeks kemampuan rutin suatu daerah dapat dilihat pada tabel II.3 sebagai berikut:

Tabel III.2 Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 - 20,00	Sangat Kurang
20,01 - 40,00	Kurang
40,01 – 60,00	Cukup
60,01 – 80,00	Baik
80,01 – 100	Sangat Baik

Sumber : Putri, (2017)

3.5.5 *Share and Growth*

Share and Growth menunjukkan seberapa besar peran pendapatan daerah dalam total belanja. *Share and Growth* juga mampu mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta melakukan peningkatan dalam mencapai kesuksesan dari satu periode ke periode berikutnya. *Share* merupakan rasio pendapatan asli daerah terhadap keseluruhan belanja daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar daerah mampu mendanai kegiatan rutin maupun pembangunan. Sedangkan *growth* adalah tingkat pertumbuhan dalam periode APBD tahun sebelumnya (Muhajirin, 2019). Hasil *Share and Growth* akan diklasifikasikan dengan menggunakan pemetaan kapasitas keuangan daerah berdasarkan metode kuadran.

Tabel III.3 Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan

Kuadran	Kondisi
I	Kondisi yang menunjukkan bahwa idealnya, PAD memiliki peran penting dalam total belanja dan wilayah yang kemungkinan besar akan dikembangkan potensi lokalnya. Kondisi tersebut digambarkan dengan <i>Share</i> dan <i>Growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi yang menunjukkan belum ideal, dalam artian meskipun PAD masih rendah, namun zona pertumbuhan potensial PAD memiliki peluang untuk berperan besar dalam total belanja. <i>Share</i> PAD rendah namun <i>Growth</i> tinggi.
III	Kondisi yang tidak ideal, peran PAD yang sudah besar

Kuadran	Kondisi
	dalam total belanja memiliki peluang yang kecil karena tingkat pertumbuhannya rendah. <i>Share</i> PAD tinggi, tetapi <i>Growth</i> rendah.
IV	Kondisi yang paling buruk, <i>Share</i> PAD yang rendah diikuti rendahnya potensi pengembangan lokal daerah. <i>Share</i> terhadap total pengeluaran rendah dan <i>Growth</i> juga rendah.

Sumber : Chasanah & Panjawa, (2020)

Kondisi ideal dapat dilihat dengan tingginya nilai *Share and Growth*. *Share and Growth* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Share} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Growth} = \frac{\text{PADi} - \text{PADi-1}}{\text{PADi-1}} \times 100\%$$

3.5.6 Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Metode analisis dengan IKK adalah suatu metode yang menggunakan rata-rata perhitungan Indeks Pertumbuhan (*Growth*), Indeks Elastisitas dan Indeks *Share*. Nilai maksimum dan minimum setiap komponen ditentukan sebelumnya untuk menyusun ketiga indeks. Cara menyusun indeks untuk setiap komponen IKK dilakukan dengan menggunakan persamaan umum:

$$\text{Index X} = \frac{\text{nilai x hasil pengukuran} - \text{nilai x minimum}}{\text{nilai x maksimum} - \text{nilai x minimum}}$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka persamaan IKK dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{IKK} = \frac{XG + XE + XS}{3}$$

Tabel III.4 Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah	Klasifikasi
0,00 – 0,33	Rendah
0,34 – 0,43	Sedang
0,41 – 1,00	Tinggi

Sumber : Chasanah & Panjawa, (2020)

